

Dinamika Institusionalisasi Pendidikan Islam Masa Kesultanan Nusantara: Studi Komparatif Kerajaan Sumatera dan Jawa

Yusril Syamsu Alam*

Program Magister Pendidikan Agama Islam IAIN Bone, Indonesia
Email: yusrilsyamsualam2003@mail.com

Idrus Latif

Program Magister Pendidikan Agama Islam IAIN Bone, Indonesia
Email: idruslatif.iainbone@gmail.com

**Correspondence*

Received: 2026-04-26 ; Accepted: 2026-05-21; Published: 2026-07-10

Abstract

This article examines the institutionalization of Islamic education during the sultanate period in the Nusantara archipelago, focusing on a comparative analysis between the Sumatran sultanates (Samudera Pasai and Aceh Darussalam) and the Javanese sultanates (Demak and Mataram Islam). Using a qualitative historical-comparative library research method, data were collected from primary and secondary literature and analyzed through source criticism and interpretation. The results show that Sumatran sultanates developed a structured, tiered institutional model (meunasah, rangkang, and dayah) closely integrated with state administration and Middle Eastern scholarly networks, whereas Javanese sultanates relied on a more organic mosque-pesantren model driven by the wali and kiai and oriented toward cultural acculturation. Both patterns nevertheless shared a common foundation of sultan-ulama synergy in institutionalizing Islamic knowledge. This comparative finding contributes to a more nuanced understanding of the regional diversity underlying the historical roots of Islamic education in Indonesia.

Keywords: *institutionalization; Islamic education; sultanate; Sumatra; Java.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji institusionalisasi pendidikan Islam pada masa kesultanan di Nusantara dengan fokus pada studi komparatif antara kesultanan-kesultanan di

Sumatera (Samudera Pasai dan Aceh Darussalam) dan kesultanan-kesultanan di Jawa (Demak dan Mataram Islam). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kepustakaan dengan pendekatan historis-komparatif; data dihimpun dari sumber primer dan sekunder kemudian dianalisis melalui kritik sumber dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesultanan di Sumatera mengembangkan model kelembagaan yang terstruktur dan berjenjang (meunasah, rangkang, dan dayah) yang menyatu erat dengan struktur pemerintahan serta jaringan keilmuan Timur Tengah, sedangkan kesultanan di Jawa mengandalkan model masjid-pesantren yang lebih cair dan organik, digerakkan oleh peran wali dan kiai serta berorientasi pada akulturasi budaya. Meskipun berbeda pola, kedua kawasan memiliki fondasi yang sama, yaitu sinergi antara sultan dan ulama dalam melembagakan keilmuan Islam. Temuan komparatif ini memberi pemahaman yang lebih utuh mengenai keragaman regional yang mendasari akar sejarah pendidikan Islam di Indonesia.

Kata Kunci: institusionalisasi; pendidikan Islam; kesultanan; Sumatera; Jawa.

A. Pendahuluan

Masuknya Islam ke Nusantara dan proses islamisasi yang menyertainya telah banyak dikaji melalui berbagai teori, seperti teori Gujarat, teori Makkah, teori Persia, dan teori Cina, yang masing-masing menekankan jalur dan waktu kedatangan Islam secara berbeda (Iswanto, 2021; Hamid, 2022). Terlepas dari perdebatan asal-usul tersebut, para sejarawan pada umumnya sepakat bahwa penyebaran Islam di Nusantara berlangsung damai melalui jalur perdagangan, dakwah, perkawinan, dan pendidikan. Setelah komunitas muslim terbentuk, kekuatan politik Islam kemudian melembaga menjadi kesultanan-kesultanan yang tersebar dari Sumatera hingga Jawa, dan lembaga pendidikan menjadi salah satu pilar utama yang menopang keberlangsungan kekuasaan sekaligus penyebaran keilmuan Islam (Mukti et al., 2022).

Kajian mengenai pendidikan Islam masa kesultanan umumnya masih terfragmentasi ke dalam studi wilayah tunggal. Di kawasan Sumatera, penelitian banyak difokuskan pada Kesultanan Samudera Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara yang menjadi pusat kajian Islam dan pelabuhan internasional (Maghfirah, 2024; Shihabuddin & Roza, 2023), serta Kesultanan Aceh Darussalam dengan sistem pendidikan berjenjang meunasah-rangkang-dayah yang berkembang pesat pada masa Sultan Iskandar Muda (Iswandi, 2019; La Moane et al., 2023; Maysarah & Nur, 2024). Di sisi lain, kajian tentang Jawa lebih banyak menyoroti peran Wali Songo, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Mataram Islam dalam membangun jaringan pesantren serta mengakulturasikan Islam dengan budaya lokal (Syarifudin et al., 2022; Savitri & Sumardiyanto, 2021; Ardyansyah, 2024).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola institusionalisasi pendidikan Islam pada masa kesultanan di Sumatera dan Jawa, serta membandingkan keduanya guna menemukan persamaan dan perbedaan karakter kelembagaan yang terbentuk di kedua kawasan tersebut. Perbandingan ini penting dilakukan karena masing-masing kawasan memiliki konteks geopolitik, jaringan keilmuan, dan corak budaya lokal yang berbeda, sehingga proses melembaganya pendidikan Islam tidak dapat dipahami sebagai satu pola tunggal yang seragam di seluruh Nusantara.

Sejumlah penelitian terdahulu memang telah membahas lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren, surau, meunasah, dan dayah secara historis (Muslim, 2021; Olivia et al., 2024; Rohmah et al., 2023), namun kajian tersebut sebagian besar bersifat deskriptif per lembaga atau per wilayah, dan belum banyak yang secara eksplisit membandingkan pola institusionalisasi antarkawasan dengan pendekatan historis-komparatif. Rama dan Yahdi (2023) serta Muthoharoh (2023) misalnya menegaskan bahwa fase institusionalisasi pendidikan Islam di Nusantara ditandai oleh terbentuknya pesantren sebagai pusat pendidikan tradisional, tetapi belum mengurai secara khusus bagaimana proses tersebut berbeda antara kawasan yang berbasis kesultanan pesisir Selat Malaka dengan kawasan pedalaman Jawa yang lebih kental nuansa akulturasi budayanya.

Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada penempatan dua kawasan yang selama ini dikaji secara terpisah, yaitu Sumatera dan Jawa, ke dalam satu kerangka analisis komparatif yang sama, dengan menitikberatkan pada dimensi institusional: bentuk lembaga, jenjang pendidikan, aktor penggerak, dan corak keilmuan yang dihasilkan. Dengan demikian, gap yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah minimnya kajian yang secara sistematis memetakan perbedaan dan persamaan pola institusionalisasi pendidikan Islam antara kesultanan berbasis maritim-tekstual di Sumatera dan kesultanan berbasis agraris-kultural di Jawa, sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana pola institusionalisasi pendidikan Islam berkembang di kesultanan-kesultanan Sumatera dan Jawa, serta apa persamaan dan perbedaan mendasar di antara keduanya?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan desain historis-komparatif. Objek kajian adalah proses institusionalisasi pendidikan Islam pada empat kesultanan yang mewakili dua kawasan, yaitu Kesultanan Samudera Pasai dan Kesultanan Aceh Darussalam di Sumatera, serta Kesultanan Demak dan Kesultanan Mataram Islam di Jawa. Sumber data terdiri atas sumber sekunder berupa artikel jurnal

ilmiah, buku, dan hasil penelitian terkini yang membahas sejarah pendidikan Islam di kedua kawasan tersebut (Ramadhan, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menelusuri, mengumpulkan, dan menyeleksi literatur yang relevan dan mutakhir. Analisis data dilakukan melalui empat tahap metode historis, yaitu: (1) heuristik, pengumpulan sumber terkait institusi pendidikan Islam di kedua kawasan; (2) kritik sumber, menilai kredibilitas dan relevansi data yang diperoleh; (3) interpretasi, menafsirkan data untuk menemukan pola institusional pada masing-masing kawasan; dan (4) historiografi, menyusun hasil interpretasi ke dalam narasi komparatif yang sistematis. Analisis komparasi dilakukan dengan menyejajarkan lima aspek, yaitu bentuk lembaga, jenjang pendidikan, aktor utama, corak keilmuan, dan relasi lembaga pendidikan dengan kekuasaan kesultanan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Institusionalisasi Pendidikan Islam di Kesultanan Sumatera

Kesultanan Samudera Pasai yang berdiri pada penghujung abad ke-13 di pesisir utara Aceh menempati kedudukan istimewa dalam sejarah Islam Nusantara sebagai kerajaan Islam pertama sekaligus simpul awal pelembagaan keilmuan Islam di kawasan ini (Maghfirah, 2024; Shihabuddin & Roza, 2023). Kemunculan Pasai tidak dapat dilepaskan dari posisinya yang strategis di jalur pelayaran dan perdagangan internasional Selat Malaka, sebuah urat nadi yang menghubungkan dunia Arab, Persia, dan India dengan kepulauan Nusantara hingga Tiongkok. Melalui jalur rempah inilah para pedagang yang sekaligus berperan sebagai dai membawa serta tradisi keilmuan Islam, sehingga bandar Pasai berkembang bukan semata sebagai pusat niaga, melainkan juga sebagai titik temu ulama lintas kawasan (Hamid, 2022; Iswanto, 2021). Peran perintis Sultan Malik al-Saleh sebagai penguasa pertama yang memeluk Islam menandai pergeseran dari komunitas muslim yang masih bersifat cair menuju kekuasaan politik Islam yang mulai menata kehidupan keagamaan rakyatnya secara lebih terarah (Fitriani et al., 2022).

Gambaran mengenai kehidupan keilmuan di Pasai dapat ditelusuri melalui catatan pengembara Ibnu Batutah yang singgah pada pertengahan abad ke-14. Ia melukiskan istana Pasai sebagai lingkungan yang dikelilingi ulama dari berbagai penjuru dunia Islam, tempat sultan sendiri aktif menghadiri majelis pengajian, berdiskusi mengenai persoalan fikih, dan menunjukkan keteguhan dalam mengamalkan mazhab Syafi'i (Mukti et al., 2022; Miswari, 2022). Pola semacam ini memperlihatkan bahwa pada fase awal, pendidikan Islam belum melembaga dalam institusi formal yang berdiri terpisah, melainkan berlangsung menyatu dengan aktivitas keistanaan dan masjid kesultanan. Proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk halaqah dan majelis taklim yang

dipimpin ulama, dengan sultan berperan ganda sebagai pelindung sekaligus peserta didik. Meskipun belum berjenjang, pola ini telah meletakkan fondasi penting bagi tumbuhnya budaya keilmuan yang menempatkan ulama pada kedudukan terhormat di lingkungan kekuasaan, sekaligus menautkan otoritas politik dengan otoritas keagamaan.

Kontribusi Pasai terhadap pelebagaan keilmuan Islam juga tampak pada perannya dalam mengembangkan bahasa Melayu sebagai wahana transmisi ilmu keislaman. Melalui aksara Jawi, khazanah kitab keagamaan mulai disalin, diterjemahkan, dan disebar, sehingga Pasai menjadi salah satu pusat penyalinan naskah dan pengajaran yang memasok dai serta rujukan keagamaan bagi kawasan sekitarnya, termasuk Malaka yang kemudian tumbuh sebagai pewaris tradisi keislaman Pasai (Nasution, 2023; Iswanto, 2021). Dengan demikian, Pasai bukan sekadar menerima Islam dari luar, melainkan turut memproduksi dan mendistribusikan keilmuan Islam ke wilayah yang lebih luas. Karakter inilah yang menjadi cikal bakal ciri maritim-tekstual pendidikan Islam di kawasan Sumatera, yakni keilmuan yang bertumpu pada penguasaan teks tertulis dan tersambung dengan jaringan pelayaran serta perdagangan antarbangsa.

Seiring melemahnya Pasai dan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, pusat gravitasi keilmuan Islam di kawasan barat Nusantara bergeser ke Kesultanan Aceh Darussalam. Aceh mewarisi sekaligus menyempurnakan tradisi keilmuan pendahulunya, dan pada masanya berkembang menjadi pusat peradaban Islam yang begitu masyhur sehingga dijuluki Serambi Mekkah. Di sinilah pola institusionalisasi pendidikan Islam yang lebih terstruktur mulai terlihat dengan jelas, terutama pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1636) yang membawa Aceh pada puncak kejayaan politik sekaligus keilmuan. Stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi pada masa ini menyediakan ruang yang kondusif bagi tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan yang lebih tertata.

Sistem pendidikan Islam di Aceh berkembang secara berjenjang dalam sebuah struktur yang relatif baku. Jenjang paling dasar adalah meunasah yang berada di tingkat gampong atau desa, berfungsi sebagai tempat anak-anak belajar membaca Al-Qur'an, menghafal doa, serta memahami dasar-dasar ibadah dan akhlak (Iswandi, 2019; Rohmah et al., 2023). Dari meunasah, peserta didik dapat melanjutkan ke rangkang, yaitu jenjang menengah yang umumnya menempel pada kompleks masjid dan mulai memperkenalkan kitab-kitab dasar dalam bidang fikih, tauhid, dan bahasa Arab. Puncak dari sistem ini adalah dayah, lembaga pendidikan tinggi yang mengkaji secara mendalam ilmu tasawuf, fikih, tafsir, hadis, mantiq, dan kebahasaan, di bawah bimbingan seorang teungku chik yang memiliki otoritas keilmuan tinggi (La Moane et al., 2023; Muslim, 2021). Struktur meunasah–rangkang–dayah ini memperlihatkan

adanya diferensiasi jenjang, kurikulum yang bertingkat, serta kesinambungan proses pendidikan dari tingkat dasar hingga lanjut, sebuah ciri kelembagaan yang membedakan Aceh dari kawasan lain di Nusantara pada masa yang sama.

Hal yang paling membedakan Aceh dari banyak kawasan lain adalah keterpaduan sistem pendidikannya dengan struktur pemerintahan kesultanan. Lembaga-lembaga pendidikan tidak berdiri sebagai entitas yang terpisah dari negara, melainkan diikat oleh qanun dan diposisikan sebagai bagian dari administrasi keagamaan kerajaan. Ulama menempati posisi strategis sebagai penasihat sultan, penjaga ortodoksi keagamaan, sekaligus penggerak utama tradisi keilmuan. Kehadiran ulama besar seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri, dan Abdurrauf as-Singkili menunjukkan betapa Aceh terhubung erat dengan jaringan keilmuan Timur Tengah, khususnya melalui koneksi dengan Haramayn, yaitu Makkah dan Madinah. Jaringan intelektual inilah yang menjadikan corak keilmuan Aceh bersifat tekstual dan berorientasi pada kitab-kitab berbahasa Arab dan Melayu, sekaligus menautkan Nusantara dengan pusat-pusat intelektual dunia Islam dan memperkaya khazanah keilmuan lokal dengan tradisi tasawuf serta fikih yang mendalam (Hamid, 2022).

Corak keilmuan yang berkembang di dayah bersifat komprehensif dan bertumpu pada penguasaan kitab berbahasa Arab. Metode pembelajaran menekankan pembacaan dan penjelasan teks secara berjenjang, penghafalan, serta pengkajian mendalam terhadap karya-karya rujukan dalam bidang fikih, tasawuf, tafsir, dan akidah. Kedudukan Aceh sebagai bandar internasional turut memperlancar arus kitab, gagasan, dan ulama dari pusat-pusat keilmuan Timur Tengah, sehingga tradisi intelektual yang tumbuh di dayah tidak terisolasi, melainkan menjadi bagian dari percakapan keilmuan dunia Islam yang lebih luas. Melalui proses inilah lahir karya-karya keagamaan berbahasa Melayu yang menjadi rujukan penting bagi perkembangan pemikiran Islam di Nusantara, sekaligus menegaskan peran Aceh sebagai penghubung antara tradisi keilmuan lokal dan global.

Keberlanjutan tradisi keilmuan ini tidak terputus setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda. Peran Sultanah Tajul Alam Safiatuddin yang memerintah sesudahnya justru memperkuat perhatian terhadap dunia pendidikan di lingkungan kesultanan, menegaskan bahwa pelebagaan pendidikan Islam di Aceh bersifat berkesinambungan dan tidak semata bergantung pada satu figur penguasa (Maysarah & Nur, 2024). Dengan demikian, institusionalisasi pendidikan Islam di kawasan Sumatera, dari Pasai hingga Aceh, memperlihatkan pola yang berkembang dari bentuk informal keistanaan menuju sistem berjenjang yang formal-struktural, terintegrasi dengan kekuasaan negara, dan tersambung dengan jaringan keilmuan internasional. Karakter maritim-tekstual yang mengedepankan penguasaan kitab, keterhubungan lintas

kawasan, dan penataan jenjang yang baku inilah yang menjadi penanda khas pendidikan Islam di Sumatera pada masa kesultanan, sekaligus menjadi warisan penting bagi lahirnya lembaga-lembaga pendidikan Islam formal di kemudian hari.

2. Institusionalisasi Pendidikan Islam di Kesultanan Jawa

Berbeda dengan pola yang berkembang di Sumatera, institusionalisasi pendidikan Islam di Jawa tumbuh dari bawah melalui peran para wali yang mendirikan pesantren di sekitar masjid sebagai basis dakwah kultural. Kesultanan Demak yang berdiri pada awal abad ke-16 di pesisir utara Jawa menjadi kerajaan Islam pertama di pulau ini, dan sejak awal karakter pelembagaan pendidikannya lebih ditentukan oleh dinamika sosial-budaya masyarakat Jawa daripada oleh penataan administratif negara (Syarifudin et al., 2022). Jika di Aceh negara menata pendidikan dari atas melalui qanun, maka di Jawa pendidikan Islam justru mengalir dari inisiatif para ulama-wali yang membangun basis keumatan di tengah masyarakat agraris yang masih kental dengan tradisi Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal. Kondisi masyarakat yang demikian menuntut pendekatan dakwah yang lebih lentur dan bertahap agar Islam dapat diterima tanpa benturan.

Pusat dakwah dan pembelajaran pada masa Demak berpusat pada peran Wali Songo, sembilan tokoh penyebar Islam yang masyhur seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, hingga Sunan Kalijaga. Masjid Agung Demak menjadi simbol sekaligus pusat kegiatan keagamaan dan keilmuan, tempat para wali merumuskan strategi dakwah yang akomodatif terhadap budaya setempat. Metode dakwah kultural yang mereka kembangkan memadukan pengajaran agama dengan media budaya lokal seperti wayang, gamelan, tembang, dan tradisi sekaten, sehingga Islam dapat diterima secara bertahap tanpa menimbulkan gejolak sosial yang berarti (Ardyansyah, 2024). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa proses islamisasi di Jawa berlangsung melalui jalur akulturasi, di mana nilai-nilai Islam disampaikan dengan bahasa, simbol, dan medium seni yang telah akrab bagi masyarakat, sehingga agama baru itu tidak dirasakan sebagai sesuatu yang asing, melainkan menyatu dengan denyut kehidupan budaya Jawa.

Dalam konteks inilah pesantren tumbuh sebagai lembaga pendidikan khas Jawa. Berbeda dengan sistem berjenjang yang baku di Aceh, struktur pesantren di Jawa bersifat cair dan organik; ia berkembang mengikuti kapasitas, karisma, dan kredibilitas seorang kiai atau wali, bukan mengikuti jenjang administratif yang ditetapkan negara (Syarifudin et al., 2022; Muslim, 2021). Relasi antara kiai dan santri bersifat personal dan penuh keteladanan, di mana santri tinggal di lingkungan pondok, menyerap ilmu sekaligus adab langsung dari sang guru dalam kehidupan sehari-hari. Model ini melahirkan ikatan keilmuan dan

spiritual yang kuat, sekaligus menjadikan keberlangsungan sebuah pesantren sangat bergantung pada figur kiai serta jaringan sosial yang dibangunnya (Rohmah et al., 2023; Olivia et al., 2024). Pesantren-pesantren awal seperti yang dirintis Sunan Ampel di Ampel Denta dan Sunan Giri di Giri Kedaton menjadi contoh bagaimana lembaga ini tidak hanya mendidik santri, tetapi juga mencetak dai yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru Nusantara bagian timur (Ratna Wulansari, 2020).

Setelah kekuasaan Demak meredup dan beralih melalui Pajang, pusat kekuasaan Islam di Jawa berpindah ke pedalaman dengan berdirinya Kesultanan Mataram Islam pada akhir abad ke-16. Perpindahan dari pesisir ke pedalaman ini turut memengaruhi corak keislaman yang berkembang, karena Mataram tumbuh di jantung kebudayaan Jawa yang sarat dengan tradisi keraton dan hierarki sosial yang mapan. Pada masa inilah akulturasi antara Islam dan budaya Jawa mencapai bentuknya yang paling khas, terutama pada masa pemerintahan Sultan Agung yang berupaya memadukan identitas keislaman dengan warisan kultural Jawa demi menjaga kohesi sosial dan legitimasi kekuasaannya.

Sistem pembelajaran di pesantren Jawa berlangsung melalui metode yang khas, seperti sorogan, yaitu bimbingan individual antara santri dan kiai, serta bandongan atau weton, yaitu pengajian kolektif ketika kiai membacakan dan menjelaskan kitab kepada sekumpulan santri. Kajian keilmuan mencakup ilmu-ilmu dasar keislaman seperti nahwu, sharaf, fikih, tauhid, dan tasawuf, dengan penekanan kuat pada pembentukan adab serta kepribadian santri. Ketidadaan jenjang administratif yang baku tidak berarti pesantren berjalan tanpa struktur, sebab kemajuan seorang santri diukur dari kitab yang telah dikuasainya, bukan dari tingkatan kelas yang formal. Fleksibilitas semacam ini memungkinkan pesantren menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi zaman, sehingga tetap relevan dari generasi ke generasi (Muslim, 2021; Olivia et al., 2024).

Sintesis Islam-Jawa pada masa Mataram tampak dalam berbagai wujud, mulai dari penyusunan kalender Jawa yang memadukan sistem penanggalan Saka dan Hijriah, tradisi grebeg, hingga arsitektur bangunan keagamaan. Salah satu contoh paling nyata adalah arsitektur ruang liwan Masjid Gedhe Mataram Kotagede yang memadukan unsur Islam dengan kosmologi Jawa, memperlihatkan bagaimana ruang ibadah pun menjadi medium akulturasi budaya (Savitri & Sumardiyanto, 2021). Dalam konteks pendidikan, Sultan Mataram memberikan dukungan politik terhadap keberadaan pesantren dan ulama keraton, namun penekanan pendidikan lebih diarahkan pada pembentukan akhlak, budi pekerti, dan harmoni sosial-budaya ketimbang pada pembakuan jenjang kelembagaan formal seperti yang berlangsung di Aceh

(Syarifudin et al., 2022). Orientasi ini sejalan dengan watak kebudayaan Jawa yang menjunjung tinggi keselarasan dan tata krama.

Meskipun demikian, dukungan kekuasaan tetap memainkan peran penting dalam menopang keberlangsungan pendidikan Islam. Keraton Mataram menempatkan ulama dan penghulu dalam struktur birokrasi keagamaan, dan lingkungan pamethakan atau perkampungan kaum putihan menjadi ruang tumbuhnya tradisi keilmuan Islam yang berdampingan dengan kehidupan istana. Namun berbeda dengan Aceh, keterlibatan negara di Jawa lebih bersifat memberi legitimasi dan perlindungan daripada mengatur kurikulum atau jenjang secara ketat. Pendidikan Islam dengan demikian menjadi sarana dakwah damai sekaligus instrumen legitimasi politik penguasa, tanpa menghilangkan otonomi para kiai dalam mengelola pesantrennya. Keseimbangan antara dukungan negara dan kemandirian kiai inilah yang menjaga vitalitas pesantren sebagai lembaga masyarakat.

Dengan demikian, institusionalisasi pendidikan Islam di Jawa, dari Demak hingga Mataram, memperlihatkan pola yang bertumpu pada relasi personal kiai-santri, akulturasi budaya, dan pembentukan akhlak, dengan negara berperan sebagai pelindung dan pemberi legitimasi. Karakter agraris-kultural yang mengedepankan kearifan lokal dan fleksibilitas ini menjadi penanda khas pendidikan Islam di Jawa, sekaligus menjadi akar bagi tumbuhnya tradisi pesantren salaf yang hingga kini tetap mempertahankan corak keilmuan dan pola pengasuhannya. Pola yang cair dan organik ini, meskipun berbeda dari sistem berjenjang yang formal di Sumatera, terbukti mampu bertahan lintas zaman dan berkembang menjadi salah satu pilar utama pendidikan Islam di Indonesia. Warisan pesantren Jawa tidak hanya menyangkut penguasaan ilmu agama, tetapi juga penanaman nilai kemandirian, kesederhanaan, dan keteladanan yang terus diwariskan dari kiai kepada santri. Keberadaannya membuktikan bahwa pelembagaan keilmuan Islam di Nusantara tidak bersifat tunggal, melainkan beragam sesuai konteks sosial-budaya masing-masing kawasan, dan justru keragaman inilah yang memperkaya lanskap pendidikan Islam Indonesia hingga masa kini.

3. Perbandingan Pola Kelembagaan

Untuk memperjelas perbandingan pola institusionalisasi pada kedua kawasan, disajikan rangkuman pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan Institusionalisasi Pendidikan Islam Kesultanan Sumatera dan Jawa

Aspek	Kesultanan di Sumatera (Samudera Pasai & Aceh Darussalam)	Kesultanan di Jawa (Demak & Mataram Islam)
Lembaga dasar	Meunasah (tingkat gampong/desa)	Masjid dan langgar/surau kampung
Lembaga lanjutan	Rangkang sebagai jenjang menengah	Pesantren yang berkembang di sekitar masjid dan kediaman kiai
Lembaga tinggi	Dayah/dayah teungku chik sebagai pusat kajian kitab tingkat lanjut	Pesantren besar yang diasuh ulama/wali dengan jaringan santri lintas daerah
Pola jenjang	Berjenjang formal-struktural (meunasah - rangkang - dayah)	Berjenjang cair dan organik, bergantung pada kapasitas kiai dan masjid
Aktor utama	Teungku/ulama dayah dengan dukungan struktur uleebalang dan sultan	Wali dan kiai dengan dukungan sultan serta bangsawan keraton
Corak keilmuan	Kuat pada kajian tasawuf, fikih, dan bahasa Arab-Melayu, terhubung jaringan Timur Tengah	Menonjol pada dakwah kultural, akulturasi seni-budaya lokal, dan pembentukan akhlak
Relasi kuasa	Pendidikan menyatu dengan struktur pemerintahan (qanun/hukum kesultanan)	Pendidikan menjadi sarana legitimasi politik sekaligus dakwah damai

Tabel 1 menunjukkan bahwa kedua kawasan sama-sama menempatkan sultan dan ulama sebagai aktor kunci, tetapi berbeda dalam hal formalisasi jenjang dan orientasi keilmuan yang dikembangkan.

Perbandingan hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa institusionalisasi pendidikan Islam di Sumatera, khususnya di Aceh, cenderung mengikuti pola formal-struktural yang terintegrasi dengan qanun atau hukum kesultanan, sehingga jenjang meunasah-rangkang-dayah berfungsi sekaligus sebagai instrumen administrasi keagamaan negara (Maysarah & Nur, 2024). Pola ini sejalan dengan temuan Hamid (2022) yang menegaskan bahwa jalur rempah dan jaringan pelabuhan Selat Malaka mempertemukan Aceh dengan pusat-pusat

keilmuan Timur Tengah, sehingga corak keilmuannya lebih tekstual dan berorientasi pada kitab-kitab berbahasa Arab dan Melayu.

Sebaliknya, di Jawa, pendidikan Islam berkembang melalui jalur kultural yang lebih cair. Wali dan kiai tidak selalu terikat pada struktur birokrasi kesultanan secara ketat, meskipun tetap mendapat legitimasi dan dukungan politik dari sultan. Pesantren tumbuh dari relasi personal antara kiai dan santri, dan keberlangsungannya lebih bergantung pada karisma serta jaringan sosial kiai ketimbang pada aturan formal kerajaan (Rohmah et al., 2023; Olivia et al., 2024). Corak ini menjadikan pendidikan Islam di Jawa lebih akomodatif terhadap unsur budaya lokal, sebagaimana tampak pada akulturasi seni dan arsitektur di lingkungan keraton Mataram (Savitri & Sumardiyo, 2021).

Meskipun berbeda pola, temuan ini memperkuat argumen Rama dan Yahdi (2023) serta Muthoharoh (2023) bahwa fase institusionalisasi menjadi titik penting dalam sejarah pendidikan Islam Nusantara, karena pada fase inilah pendidikan informal di masjid mulai bertransformasi menjadi lembaga yang lebih terorganisasi. Perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini melengkapi kajian-kajian sebelumnya yang cenderung membahas satu kawasan secara terpisah (Iswandi, 2019; Syarifudin et al., 2022), dengan menunjukkan bahwa variasi geopolitik dan budaya lokal turut membentuk karakter institusional yang berbeda meskipun keduanya berasal dari akar keislaman yang sama.

Perbedaan pola institusionalisasi ini juga relevan untuk memahami wajah pendidikan Islam Indonesia kontemporer. Sistem dayah di Aceh yang terstruktur berjenjang menjadi cikal bakal madrasah dan pendidikan diniyah formal, sementara model pesantren Jawa yang berbasis relasi kiai-santri melahirkan tradisi pesantren salaf yang hingga kini tetap mempertahankan fleksibilitas kurikulumnya. Dengan demikian, keragaman pola kesultanan pada masa lampau memberi kontribusi pada keragaman lanskap pendidikan Islam di Indonesia saat ini, baik dalam bentuk madrasah, dayah, maupun pesantren. Warisan kelembagaan ini sekaligus menjadi pijakan bagi upaya rekonstruksi pendidikan Islam kontemporer yang menekankan penguatan epistemologi keislaman dan pedagogi berbasis adab di tengah arus globalisasi (Anwar & Umam, 2025), termasuk dalam pengembangan kurikulum madrasah yang mengintegrasikan nilai-nilai ketauhidan sebagai basis pembentukan karakter (Anwar et al., 2025).

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa institusionalisasi pendidikan Islam pada masa kesultanan Nusantara berkembang melalui dua pola yang berbeda namun saling melengkapi. Di Sumatera, khususnya Kesultanan Aceh Darussalam, pendidikan Islam melembaga secara formal-struktural melalui jenjang meunasah, rangkang, dan dayah yang menyatu dengan sistem

pemerintahan kesultanan dan jaringan keilmuan Timur Tengah. Di Jawa, khususnya Kesultanan Demak dan Mataram Islam, pendidikan Islam melembaga secara lebih organik melalui jaringan masjid dan pesantren yang digerakkan oleh wali dan kiai, dengan penekanan kuat pada akulturasi budaya lokal. Persamaan mendasar dari kedua pola tersebut terletak pada peran sentral sinergi sultan dan ulama sebagai penopang utama keberlangsungan pendidikan Islam.

Temuan ini menegaskan bahwa akar sejarah pendidikan Islam di Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan terbentuk dari keragaman pola regional yang saling memperkaya. Bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran Islam kontemporer, pemahaman atas keragaman ini penting sebagai dasar untuk merancang model pendidikan yang tetap menghargai kearifan lokal masing-masing daerah, sekaligus mendorong perancangan model pendidikan Islam yang transformatif dan relevan dengan tuntutan kompetensi abad ke-21 (Anwar & Umam, 2020), serta memperkuat jaringan keilmuan Islam secara nasional tanpa menyeragamkan bentuk kelembagaannya.

Daftar Pustaka

- Anwar, S., & Umam, H. (2020). Transformative education: Emphasizing 21st century skills and competencies in the independent learning curriculum. *AIM: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.15575/aim.v1i1.28886>
- Anwar, S., & Umam, H. (2025). Globalization and the crisis in Islamic education: Al-Attas' epistemological response and the reconstruction of adab-based pedagogy. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 11(1), 135–149. <https://doi.org/10.24235/jy.v11i1.21161>
- Anwar, S., Maulani, F., Lutfiah, W., Syadiah, S. I. H., & Azizah, A. S. N. (2025). Integrasi nilai ketauhidan dan ekopedagogi dalam kurikulum madrasah ibtidaiyah untuk penguatan karakter peduli lingkungan. *TSAQAFATUNA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 7(1).
- Ardyansyah, M. F. (2024). Pengaruh metode dakwah Sunan Kalijaga terhadap pelestarian dan islamisasi budaya di Tanah Jawa. *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(3), 139–150.
- Fitriani, A., Siregar, I., & Ramli, S. (2022). Peran Sultan Malikussaleh dalam perkembangan Kerajaan Samudera Pasai 1297–1326 M. *JEJAK: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*.
- Hamid, A. R. (2022). Jalur rempah dan islamisasi Nusantara. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(3), 269–282. <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i3.1065>
- Iswandi, I. (2019). Pilar-pilar pendidikan Islam di Kesultanan Aceh. *Edudeena: Journal of Islamic Religious Education*, 3(2), 109–121.

- Iswanto, J. (2021). Pertumbuhan institusi sosial dan politik Samudera Pasai, Malaka, Banten, dan Mataram. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 2(1), 38–49.
- La Moane, M., Rama, B., & Achruh, A. (2023). Perkembangan pendidikan Islam masa awal hingga lahirnya Kerajaan Islam di Aceh, lembaga, dan tokohnya. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), 162–174.
- Maghfirah, M. (2024). Relasi kuasa dan islamisasi: Dinamika hukum Islam di Kesultanan Samudera Pasai. *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 7(1), 37–49.
- Maysarah, & Nur, H. B. M. (2024). Kiprah Sultanah Tajul Alam Safiatuddin dalam memajukan pendidikan di Kerajaan Aceh Darussalam. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 26–41. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.26>
- Miswari, M. (2022). Kesultanan Samudra Pasai dan strategi islamisasi Nusantara. *Liwa'ul Dakwah*, 13(2).
- Mukti, A., Budianti, Y., Sinaga, R., Amiluddin, A., & Fuadi, S. (2022). Pendidikan Islam masa Kesultanan Samudera Pasai. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2).
- Muslim, M. (2021). Pertumbuhan institusi pendidikan awal di Indonesia: Pesantren, surau, dan dayah. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 2(1), 19–37.
- Muthoharoh, M. (2023). Historis pendidikan Islam di Nusantara. *Attanwir: Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, 14(1), 69–82.
- Nasution, K. A. (2023). *Sejarah ringkas Kerajaan Samudera Pasai: Sejarah peradaban luhur Nusantara*. DIVA Press.
- Olivia, O., Zulmuqim, & Masyhudi, F. (2024). Sejarah serta dinamika pembaharuan lembaga pendidikan Islam di Indonesia (Surau, pesantren dan madrasah). *Pandawa*, 6(1), 54–69.
- Rama, B., & Yahdi, M. (2023). Pendidikan Islam pada masa awal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 2(2), 152–160.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Ratna Wulansari, A. S. (2020). Sejarah pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 20(2), 84. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v20i2.6676>
- Rohmah, U. S., Hamid, N., & Su'aedi, I. F. (2023). Sejarah dan dinamika lembaga pendidikan Islam di Nusantara: Surau, meunasah, pesantren, dan madrasah. *Social Science Academic*, 1(2), 613–624. <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i2.4039>
- Savitri, P. L., & Sumardiyanto, B. (2021). Akulturasi Islam dan budaya Jawa pada ruang liwan Masjid Gedhe Mataram Kotagede. *Arsitektura: Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan*, 19(1), 51–62. <https://doi.org/10.20961/arst.v19i1.45153>

- Shihabuddin, A., & Roza, E. (2023). Sejarah uang dirham Kesultanan Samudera Pasai: Kontribusi terhadap peradaban Islam di Indonesia. *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(2), 171–186.
- Syarifudin, M., Hasanah, U., & Kurniawan, D. (2022). Peran kesultanan Islam dalam pengembangan pendidikan Islam di Jawa. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 7(2), 250–262. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7\(2\).10452](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7(2).10452)